



## Trade Off Antara Pengangguran, Inflasi, dan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Islam

Irdlin Hanifah<sup>1</sup>, Putri Kharisma Ayuningtiyas<sup>2</sup>, Ines Kiki Faradila Hardika Dini<sup>3</sup>,  
Lailatul Fadilah<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

E-mail: [irdlin13@gmail.com](mailto:irdlin13@gmail.com)<sup>1</sup>, [putrikharisma803@gmail.com](mailto:putrikharisma803@gmail.com)<sup>2</sup>, [inezkiki520@gmail.com](mailto:inezkiki520@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[lailafdl1308@gmail.com](mailto:lailafdl1308@gmail.com)<sup>4</sup>, [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten  
Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: [irdlin13@gmail.com](mailto:irdlin13@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the trade-off between unemployment and inflation, as well as government policies from an Islamic perspective. Inflation and unemployment issues remain primary challenges for governments in maintaining economic stability. Unlike conventional economic perspectives that accept the trade-off between these two variables, Islamic economics offers a more integrative and holistic approach. Using a literature review method, this study analyzes various literature related to the relationship between unemployment and inflation from both conventional and Islamic economic perspectives. Research findings reveal that in conventional economics, the Phillips Curve depicts a trade-off between unemployment and inflation in the short term, though its validity is questioned in the long term. In contrast, from an Islamic economic perspective, there is no dichotomy between reducing unemployment and controlling inflation, as both can be addressed simultaneously through a just economic system aligned with Sharia principles. Islamic economics offers solutions through strengthening the real sector, profit-sharing financial systems, and implementing zakat, infaq, and waqf instruments that can create employment without generating inflationary pressures. This research provides insights into government policies that align with Sharia values in addressing current macroeconomic challenges.*

**Keywords:** *Unemployment, Inflation, Trade-Off, Government Policy, Islamic Economics*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trade off antara pengangguran dan inflasi, serta kebijakan pemerintah dalam perspektif Islam. Permasalahan inflasi dan pengangguran menjadi fokus utama yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Berbeda dengan perspektif ekonomi konvensional yang menerima adanya trade off antara kedua variabel tersebut, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih integratif dan holistik. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur terkait hubungan pengangguran dan inflasi, baik dari perspektif ekonomi konvensional maupun Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi konvensional, Kurva Phillips menggambarkan adanya trade off antara pengangguran dan inflasi dalam jangka pendek, namun validitasnya dipertanyakan dalam jangka panjang. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam, tidak ada dikotomi antara tujuan menekan pengangguran dan mengendalikan inflasi, karena keduanya dapat ditangani secara bersamaan melalui sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi Islam menawarkan solusi berupa penguatan sektor riil, sistem keuangan berbasis bagi hasil, serta implementasi instrumen zakat, infak, dan wakaf yang dapat menciptakan lapangan kerja tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kebijakan pemerintah yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam menghadapi tantangan makroekonomi saat ini.

**Kata kunci:** Pengangguran, Inflasi, Trade Off, Kebijakan Pemerintah, Ekonomi Islam

## 1. LATAR BELAKANG

Pengangguran dan inflasi adalah dua isu utama dalam ekonomi makro yang selalu menjadi fokus dalam penyusunan kebijakan ekonomi di berbagai negara. Kedua faktor ini tidak hanya mencerminkan keadaan umum perekonomian, tetapi juga berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan dalam perekonomian, sementara inflasi yang tidak terkontrol mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Dalam usaha untuk mengatur kedua faktor ini, pembuat keputusan sering menghadapi dilema, di mana langkah yang diambil untuk menangani satu masalah dapat memperparah masalah lain. Dari sudut pandang ekonomi klasik, hubungan antara pengangguran dan inflasi telah dijelaskan melalui teori Kurva Phillips, yang menggambarkan adanya hubungan negatif antara keduanya dalam jangka pendek. Ketika tingkat pengangguran menurun, tekanan inflasi cenderung meningkat, dan sebaliknya. Teori ini menjadi dasar bagi banyak bank sentral dalam merumuskan kebijakan moneter dan sasaran inflasi. Namun, beberapa peristiwa ekonomi, seperti stagflasi yang terjadi di tahun 1970-an, telah memicu perdebatan mengenai relevansi Kurva Phillips, terutama dalam jangka panjang.

Di sisi yang lain, ekonomi Islam memberikan sudut pandang yang lain mengenai hubungan antara tingkat pengangguran, inflasi, dan langkah-langkah ekonomi. Dalam perspektif Islam, fenomena ekonomi tak dapat terpisahkan dari aspek moral, sosial, dan spiritual. Pengangguran dianggap tidak hanya sebagai isu ekonomi, melainkan juga sebagai persoalan moral karena bekerja adalah kewajiban dan merupakan bentuk ibadah. Sementara itu, inflasi dalam ajaran Islam sering kali terkait dengan praktik-praktik terlarang seperti riba, monopoli, dan spekulasi yang menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, memiliki peluang besar untuk menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan makroekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran dan inflasi dari tahun 2023 hingga 2025, di mana pengangguran tercatat sebesar 4,76% dan inflasi sebesar 0,76% pada tahun 2025. Walaupun angka-angka ini menunjukkan adanya perbaikan, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan timbal balik antara tingkat pengangguran dan inflasi, serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk

mengatasinya dari sudut pandang ekonomi Islam. Dengan memahami cara Islam memandang permasalahan ini, diharapkan dapat diperoleh solusi yang lebih adil dan menyeluruh dalam menghadapi tantangan di bidang ekonomi makro. Di samping itu, studi ini juga akan membahas berbagai alat ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sistem keuangan syariah yang dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan menjaga kestabilan harga.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengangguran dalam Perspektif Islam**

Pengangguran menurut perspektif Islam dianggap sebagai persoalan yang melampaui aspek ekonomi, melainkan juga terkait dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Islam menekankan pentingnya setiap orang untuk berusaha, karena bekerja merupakan bentuk pengabdian dan manifestasi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa penghasilan terbaik adalah yang diperoleh melalui usaha yang gigih. Oleh sebab itu, pengangguran yang terjadi tanpa alasan yang valid, seperti ketidakmampuan fisik atau keterbatasan tertentu, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, Islam juga menyadari bahwa pengangguran dapat muncul akibat faktor struktural, seperti minimnya kesempatan kerja atau ketidakadilan dalam pembagian kekayaan. Dalam keadaan ini, negara memiliki tanggung jawab penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang adil, menyediakan pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan peluang usaha untuk masyarakat. Negara harus berperan sebagai pengawas yang memastikan kesejahteraan masyarakat melalui sistem yang merata dan inklusif. Selain itu, Islam memberikan solusi terhadap masalah pengangguran melalui instrumen keuangan seperti zakat, wakaf, dan infak, yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi. Di samping itu, pembiayaan syariah dalam bentuk mudharabah dan musyarakah bisa memberikan akses usaha bagi mereka yang kekurangan modal.<sup>1</sup> Selain itu, semangat kerja yang diajarkan dalam Islam, seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab, menjadi faktor penting dalam mencegah pengangguran. Penyelesaian masalah pengangguran dalam Islam bukan hanya merupakan tugas individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

---

<sup>1</sup> Yolanda Kirana Sari, Agung Rizkiyan, dan Apriza, "Pengangguran dalam Perspektif Islam" dalam <https://ejournal.areas.or.id>, diakses 12 Mei 2025

## **Inflasi dalam Perspektif Islam**

Inflasi, yang merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara keseluruhan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan individu. Dalam pandangan Islam, inflasi dianggap bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga masalah sosial yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Satu aspek penting dalam ekonomi Islam adalah penggunaan mata uang yang stabil serta didasarkan pada nilai nyata, seperti logam mulia emas dan perak, untuk mencegah inflasi akibat pencetakan uang yang berlebihan. Selain itu, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian kekayaan, di mana ketidakmerataan ekonomi dapat memperburuk pengaruh inflasi. Ketika kekayaan terakumulasi pada sekelompok kecil orang, rakyat miskin dan menengah akan semakin terjepit, yang berdampak negatif pada daya beli dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam Islam, inflasi dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran barang dan jasa, dan penyalahgunaan dalam kebijakan moneter seperti pencetakan uang tanpa dukungan yang cukup.<sup>2</sup> Islam juga melarang praktik spekulatif yang bisa membuat harga barang melonjak tanpa alasan jelas, sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang menasihati untuk tidak menimbun barang yang berakibat pada inflasi. Sebagai cara mengatasi hal ini, Islam mendorong penerapan kebijakan ekonomi yang adil dan berlandaskan prinsip sosial. Zakat, infak, dan wakaf dianggap sebagai alat yang esensial untuk memperbaiki distribusi kekayaan, sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.<sup>3</sup> Selain itu, pengawasan terhadap harga barang dan kebutuhan pokok serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor riil dapat membantu mengurangi efek inflasi. Dengan demikian, menurut perspektif Islam, manajemen ekonomi yang adil, kestabilan moneter yang sehat, dan distribusi kekayaan yang merata adalah cara utama untuk mencegah dan menangani inflasi.

## **Kebijakan Pemerintah: Tradeoff dalam Ekonomi Syariah**

Dalam sistem ekonomi tradisional, pemerintah sering kali dihadapkan pada keputusan yang rumit, atau trade-off, antara beberapa kebijakan yang saling bertentangan. Salah satu contohnya adalah relasi antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, atau antara penurunan angka pengangguran dan inflasi yang lebih rendah. Sebaliknya, dalam ekonomi

---

<sup>2</sup> Evi Silvia Aulina, dkk., "Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam : Membangun Ekonomi yang Adil dan Stabil" dalam <https://journal.arei.or.id>, diakses 12 Mei 2025

<sup>3</sup> Ainal Karimah, "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Arus Inflasi di Kalsel Periode 2021-2023" dalam <https://maryamsejahtera.com> diakses 12 Mei 2025

syariah, meskipun trade-off ini masih ada, terdapat prinsip tambahan yang membuatnya berbeda dari ekonomi konvensional. Ekonomi syariah sangat menekankan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam sistem ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan sosial, penghindaran riba, dan distribusi kekayaan yang adil. Pada titik ini, trade-off tidak hanya menilai efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap kesejahteraan sosial, etika, dan keadilan. Salah satu contoh trade-off yang kerap terjadi dalam kebijakan ekonomi syariah adalah antara menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk menghentikan inflasi dan kebijakan fiskal yang lebih longgar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan ini, pemerintah harus cermat melihat efek kebijakan terhadap masyarakat, terutama untuk kalangan yang kurang beruntung. Kebijakan yang fokus hanya pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi kekayaan berisiko menimbulkan ketimpangan sosial, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>4</sup> Selain itu, dalam ekonomi syariah, pemerintah juga perlu memikirkan penggunaan instrumen seperti zakat, wakaf, dan infak sebagai metode untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan keseimbangan sosial. Untuk itu, keputusan yang diambil harus selalu berusaha mencari keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang telah ditetapkan dalam syariah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, atau yang lebih dikenal dengan metode literatur. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis literatur yang relevan guna memahami trade off antara pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah dari perspektif Islam. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, meliputi buku, jurnal akademik, artikel, dan dokumen resmi yang membahas isu trade off, pengangguran, inflasi, serta kebijakan pemerintah dalam konteks Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian dan kredibilitasnya sebagai referensi ilmiah. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi tema-tema utama

---

<sup>4</sup> Siti Mujiatun, "Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam" dalam <https://jurnal.umsu.ac.id> diakses 12 Mei 2025

yang berkaitan dengan dampak pengangguran dan inflasi terhadap perekonomian, kebijakan yang diambil untuk mengatasi pengangguran dan inflasi, serta trade off antara keduanya dalam perspektif Islam.

Hasil analisis yang diperoleh diharapkan dapat disusun dalam bentuk narasi yang menjelaskan pandangan Islam terkait pengangguran dan inflasi. Selain itu, diharapkan analisis ini juga memberikan wawasan tentang kebijakan pemerintah yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Tingkat Pengangguran dan Inflasi di Indonesia

Tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia adalah dua indikator penting yang menggambarkan situasi ekonomi nasional. Angka pengangguran menggambarkan persentase dari tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan, dan meskipun trendnya menunjukkan penurunan, masalah seperti ketidakcocokan keterampilan dan dominasi sektor informal masih menjadi penghalang dalam menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Sementara itu, inflasi menggambarkan peningkatan harga barang dan jasa secara umum, yang di Indonesia masih dapat dikendalikan berkat kebijakan dari pemerintah dan bank sentral. Meski begitu, inflasi tetap rentan terhadap perubahan harga makanan dan energi. Kedua indikator ini saling terkait dan membutuhkan manajemen yang baik agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan stabil dan inklusif.

**Tabel 1. Data Inflasi dan Pengangguran Menurut BPS**

| <b>INDIKATOR</b>    | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PENGANGGURAN</b> | <b>5,38%</b> | <b>4,86%</b> | <b>4,76%</b> |
| <b>INFLASI</b>      | <b>1,80%</b> | <b>1,57%</b> | <b>0,76%</b> |

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran dan tingkat inflasi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2023 hingga 2025. Di tahun 2023, angka pengangguran tercatat di level 5,38%, lalu turun menjadi 4,86% pada 2024, dan kembali berkurang menjadi 4,76% pada 2025.<sup>5</sup> Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam lapangan kerja di seluruh negara, yang berarti lebih banyak individu berhasil mendapatkan pekerjaan. Beberapa faktor yang mungkin berpengaruh terhadap hal ini antara lain perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah investasi, serta upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya melalui pengembangan sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun,

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025

meskipun angka pengangguran menurun, hal ini tidak selalu berarti adanya peningkatan yang signifikan dalam belanja masyarakat. Banyak pekerjaan yang muncul mungkin berasal dari sektor informal yang menawarkan penghasilan rendah, sehingga daya beli masyarakat masih terbatas.

Di sisi lain, angka inflasi juga menunjukkan penurunan yang cukup drastis dalam tiga tahun terakhir. Inflasi tercatat 1,80% pada tahun 2023, berkurang menjadi 1,57% pada tahun 2024, dan hanya mencapai 0,76% di tahun 2025.<sup>6</sup> Meskipun tingkat inflasi yang rendah sering kali dilihat sebagai tanda stabilitas harga barang dan jasa, angka yang sangat minimal dapat menunjukkan melemahnya kemampuan beli masyarakat dan berkurangnya permintaan di pasar dalam negeri. Proses digitalisasi dan peningkatan efisiensi teknologi telah menciptakan lapangan kerja baru tanpa menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, sedangkan upaya pemerintah untuk mempertahankan stabilitas harga telah berkontribusi dalam menekan tingkat inflasi. Dengan demikian, meskipun keadaan ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan, inflasi yang rendah mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan stabilitas harga dengan pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong konsumsi domestik dan menciptakan suasana investasi yang positif. Jika dibiarkan, inflasi yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan.

### **Trade Off Pengangguran dan Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Konvensional**

Dalam pandangan ekonomi tradisional, keterkaitan antara pengangguran dan inflasi telah menjadi fokus penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi makro. Inti dari hubungan ini adalah Kurva Phillips, yang diperkenalkan oleh A. W. Phillips pada tahun 1958. Kurva ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan laju inflasi dalam periode singkat. Ketika pengangguran menurun akibat peningkatan aktivitas ekonomi, tekanan pada harga cenderung meningkat, yang menyebabkan inflasi. Sebaliknya, ketika inflasi menurun, ini biasanya terkait dengan lemahnya permintaan agregat sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, dalam konteks ini, terdapat dilema antara mencapai kestabilan harga dan menciptakan lapangan kerja. Namun, seiring dengan berkembangnya teori ekonomi, para ekonom mulai meragukan keabsahan hubungan ini dalam jangka panjang. Tokoh-tokoh seperti Milton Friedman dan Edmund Phelps

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

mengkritik versi tradisional Kurva Phillips dengan memperkenalkan teori tingkat pengangguran alami dan Kurva Phillips yang dianggap diperkuat oleh ekspektasi. Dalam pandangan ini, pengangguran akan kembali ke tingkat alaminya dalam jangka panjang, walaupun inflasi mungkin meningkat akibat kebijakan moneter yang bertujuan memperluas.<sup>7</sup> Ini berarti usaha untuk menurunkan pengangguran di bawah tingkat alaminya melalui peningkatan permintaan agregat akan bersifat sementara dan akan berujung pada inflasi yang lebih tinggi tanpa menambah jumlah lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi hanya berlaku dalam jangka pendek dan tidak bersifat struktural.

Perbedaan cara pandang antara ekonomi Keynesian dan Moneteris semakin menjelaskan berbagai sudut pandang terkait hubungan antara inflasi dan pengangguran. Pengikut Keynesian percaya bahwa saat menghadapi resesi atau tingkat pengangguran yang tinggi, pemerintah dapat campur tangan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif tanpa langsung menyebabkan inflasi. Hal ini disebabkan oleh kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi terjadi tanpa banyak tekanan pada harga. Sementara itu, pengikut Moneteris memandang inflasi sebagai masalah yang bersifat moneter yang muncul karena peningkatan jumlah uang yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, mereka menentang upaya untuk mengurangi pengangguran melalui peningkatan permintaan agregat karena akan memicu inflasi yang sulit untuk dikendalikan. Konsekuensi kebijakan dari perdebatan ini sangat krusial, terutama ketika ekonomi menghadapi situasi kompleks seperti stagflasi, yang merupakan kombinasi dari inflasi tinggi dan pengangguran tinggi yang terjadi bersamaan. Kondisi ini pernah dihadapi pada tahun 1970-an dan menimbulkan keraguan terhadap Kurva Phillips dalam pengertiannya yang paling sederhana. Untuk mengatasi fenomena ini, telah muncul pendekatan baru seperti teori ekspektasi rasional yang menekankan pentingnya harapan masyarakat terhadap keberhasilan kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, transparansi dan kredibilitas bank sentral sangat penting untuk mengatur harapan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Secara empiris, hubungan antara pengangguran dan inflasi juga tidak selalu menunjukkan pola yang tetap. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, trade off antara kedua variabel ini kadang terlihat, namun seringkali hubungan tersebut tidak jelas karena ada faktor struktural, seperti dominasi sektor informal, kekakuan pasar tenaga kerja,

---

<sup>7</sup> Amalia Nuril Hidayati, dkk., "Analisis Dinamika Inflasi dan Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Teori Kurva Phillips" dalam <https://ejurnal.kampusakademik.co.id> diakses 12 Mei 2025

serta ketergantungan pada harga komoditas. Ada masa dalam sejarah ekonomi Indonesia ketika inflasi yang tinggi terjadi secara bersamaan dengan tingkat pengangguran yang tinggi juga, yang menunjukkan bahwa hubungan Kurva Phillips tidak selalu berlaku secara universal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dinamika lokal, harapan masyarakat, dan efektivitas kebijakan menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan trade off antara pengangguran dan inflasi di setiap negara.

### **Trade Off Pengangguran dan Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, masalah trade off antara pengangguran dan inflasi tidak hanya dilihat dari segi hubungan kuantitatif antara kedua variabel makroekonomi, tetapi juga dikaji dalam konteks moral, keadilan dalam distribusi, dan stabilitas sosial. Ekonomi Islam tidak hanya menyikapi inflasi dan pengangguran sebagai fenomena mekanis yang muncul dari interaksi permintaan dan penawaran agregat, tetapi juga sebagai gambaran ketidakseimbangan nilai dan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, pengangguran tidak hanya diidentifikasi sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan moral karena pengangguran menghilangkan hak dasar manusia untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Oleh karena itu, upaya pencegahan pengangguran bukan hanya dilihat dari perspektif makroekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari maqashid al-shariah, yaitu untuk melindungi harta, jiwa, dan keberlangsungan hidup manusia. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dianggap sebagai bentuk ketidakstabilan harga yang bertentangan dengan asas keadilan (adl) dan kepastian dalam bertransaksi (yaqin). Inflasi yang tinggi mampu mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu, serta menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Dengan demikian, ekonomi Islam menekankan pada pentingnya sistem moneter yang stabil, yang didasarkan pada uang dengan nilai intrinsik seperti dinar dan dirham, serta melarang praktek riba, spekulasi (gharar), dan penimbunan (ihtikar) yang diyakini sebagai penyebab utama distorsi harga dalam ekonomi konvensional. Dalam hal ini, inflasi tidak bisa dianggap sebagai dampak yang wajar dari penciptaan lapangan kerja, tetapi sebagai hasil dari kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan (barakah).

Berbeda dengan metode tradisional yang biasanya menganggap adanya trade off antara inflasi dan pengangguran sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, ekonomi Islam sebenarnya berusaha mencari solusi yang bersamaan dan terpadu untuk mengatasi keduanya. Salah satu inti dari ekonomi Islam adalah meningkatkan produktivitas sektor riil melalui

sistem keuangan yang berlandaskan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Sistem ini memfasilitasi pengalokasian dana ke sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja tanpa mencetak uang secara berlebihan, sehingga menghindari tekanan inflasi. Selain itu, zakat, infak, dan wakaf juga berperan krusial dalam menjaga distribusi kekayaan dan membangun mekanisme jaminan sosial yang dapat mengurangi tingkat pengangguran yang bersifat struktural. Selain itu, Islam menolak praktik eksploitasi tenaga kerja serta melarang monopoli dan manipulasi pasar yang dapat menyebabkan penyimpangan harga.<sup>8</sup> Negara dalam sistem ekonomi Islam berfungsi sebagai pengatur (hākim) yang bertugas untuk memastikan keadilan ekonomi dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung, menyediakan pendidikan dan pelatihan, serta menjamin ketersediaan lapangan kerja yang produktif. Dengan demikian, dalam konteks ekonomi Islam, solusi untuk pengangguran dan inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter jangka pendek, tetapi juga pada perbaikan struktur ekonomi, distribusi aset, dan etika para pelaku ekonomi.

Secara umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam menolak adanya trade off jangka panjang antara inflasi dan pengangguran. Keduanya bukanlah pilihan yang perlu dikompromikan, melainkan merupakan tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan lewat sistem ekonomi yang adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, keberhasilan ekonomi dinilai tidak hanya dari rendahnya tingkat inflasi dan pengangguran, tetapi juga dari keadilan dalam distribusi, keberkahan usaha, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **Kebijakan Mengatasi Pengangguran dan Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Konvensional**

Dalam pandangan ekonomi tradisional, masalah pengangguran dan inflasi adalah dua isu makroekonomi yang sangat penting dan sering kali menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan publik. Untuk mengatasi kedua isu tersebut, terdapat dua alat utama yang biasanya diterapkan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua kebijakan ini berfungsi saling melengkapi untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Meskipun demikian, karena adanya kemungkinan trade-off antara inflasi dan pengangguran, seperti yang terlihat dalam Kurva Phillips, pembuat kebijakan harus berhati-hati agar usaha untuk

---

<sup>8</sup> Intan Dwi Oktavia, dkk., "Hubungan Inflasi dan Pengangguran Dalam Ekonomi Islam" dalam <https://oaj.jurnalhst.com> diakses 12 Mei 2025

mengurangi satu masalah tidak memperburuk yang lain. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dijalankan pemerintah melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam hal pengangguran, kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif diterapkan dengan cara menambah pengeluaran pemerintah, terutama di sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti infrastruktur, pendidikan, dan proyek-proyek sosial. Peningkatan pengeluaran ini bertujuan untuk mendorong permintaan total dan menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu, pengurangan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak perusahaan, dilakukan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Dengan langkah ini, sektor swasta akan lebih terdorong untuk meningkatkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Namun, peningkatan permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi bisa menyebabkan inflasi, yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif.

Sementara itu, pengaturan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dan berorientasi pada kontrol jumlah uang yang beredar serta penetapan suku bunga. Untuk mengatasi masalah pengangguran, bank sentral bisa menerapkan strategi moneter yang memperluas, contohnya dengan menurunkan suku bunga acuan. Suku bunga yang rendah membuat peminjaman menjadi lebih ekonomis, sehingga mendorong lebih banyak investasi dan konsumsi. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan keseluruhan, yang membuat perusahaan memperbesar skala produksi dan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Namun, pertumbuhan aktivitas ekonomi yang terlalu cepat dapat menimbulkan risiko inflasi. Oleh karena itu, untuk mengendalikan inflasi, bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, atau meningkatkan rasio cadangan wajib bank, bertujuan untuk mengurangi likuiditas dan menekan harga di pasar. Kebijakan moneter memiliki keuntungan dalam hal fleksibilitas dan respons yang cepat dibandingkan dengan kebijakan fiskal, tetapi seringkali efeknya terbatas jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan tinggi terhadap sistem perbankan dan nilai tukar.<sup>9</sup> Di sisi lain, kebijakan fiskal cenderung memiliki efek langsung yang lebih besar dalam menciptakan pekerjaan dan distribusi pendapatan, tetapi memerlukan proses politik yang lebih rumit dan waktu pelaksanaan yang lebih lama. Oleh karena itu, banyak negara dalam praktiknya menerapkan kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung, terutama pada saat menghadapi krisis ekonomi. Dengan demikian, dalam

---

<sup>9</sup> Elsa Susanti, Meri Kartika, dan Muhammad Albahi, "Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam <https://journal.uinsi.ac.id> diakses 12 Mei 2025

konteks ekonomi yang tradisional, kebijakan fiskal dan moneter sama-sama memiliki peran penting dalam menangani pengangguran dan inflasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada diagnosis yang akurat tentang sumber masalah, respons yang cepat, serta adanya koordinasi yang erat antara lembaga fiskal dan moneter. Di tengah tantangan global yang semakin rumit, kebijakan yang fleksibel dan memiliki kredibilitas menjadi faktor kunci untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **Kebijakan Mengatasi Pengangguran dan Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, langkah-langkah untuk menangani pengangguran dan inflasi tidak hanya fokus pada hasil ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moralitas, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Setiap langkah kebijakan perlu sejalan dengan maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), yang melindungi lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengangguran dan inflasi dianggap sebagai dua masalah serius yang dapat mengganggu stabilitas sosial, melanggar hak-hak dasar manusia, dan menghalangi terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mengatasi pengangguran, ekonomi Islam lebih mengutamakan penguatan ekonomi secara produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor nyata dan model investasi berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Berbeda dengan sistem konvensional yang bergantung pada bunga, model ini mengalirkan dana langsung ke sektor usaha dengan membagi risiko dan keuntungan, sehingga lebih mendorong terciptanya wirausaha yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Selain itu, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang efektif untuk membantu mereka yang menganggur, terutama bagi mereka yang terkena dampak krisis ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran aktif, tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelopor dalam menciptakan lapangan kerja. Ini dilakukan melalui kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur ekonomi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses pendidikan. Selain itu, penggunaan wakaf dan infaq dapat dimanfaatkan untuk menyediakan modal usaha bagi sektor informal dan UMKM, yang terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran struktural.

Sementara itu, dalam menghadapi inflasi, ekonomi Islam menyoroti pentingnya menjaga kestabilan harga serta menghindari distorsi dalam pasar. Praktik riba, gharar

(ketidakpastian yang berlebihan), dan ihtikar (penimbunan barang) dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakstabilan harga. Inflasi dapat dikendalikan dengan mengatur jumlah uang yang beredar tanpa menciptakan ketidakadilan sosial. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan harga untuk memastikan distribusi barang yang adil dan menghindari lonjakan harga yang merugikan baik konsumen maupun produsen. Sebagai alternatif untuk mencegah inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang secara berlebihan, sistem moneter Islam yang berfokus pada nilai intrinsik logam mulia seperti dinar dan dirham juga dipertimbangkan.<sup>10</sup> Instrumen sosial dalam Islam seperti zakat, infaq, dan wakaf turut berperan dalam meredakan inflasi dengan secara tidak langsung mengurangi ketimpangan ekonomi yang merupakan salah satu penyebab utama inflasi. Zakat yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung usaha kecil, sehingga memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan kestabilan sosial.

Tidak seperti metode biasa yang sering kali menganggap adanya kompromi antara inflasi dan pengangguran, ekonomi Islam percaya bahwa keduanya dapat diatasi secara bersamaan dengan pendekatan yang komprehensif, adil, dan terhindar dari praktik ekonomi yang merugikan. Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi yang produktif tidak harus menyebabkan inflasi jika dilakukan tanpa melakukan pencetakan uang yang berlebihan. Begitu juga, pengendalian inflasi tidak perlu mengorbankan kesejahteraan masyarakat jika dilaksanakan dengan prinsip pembagian yang adil dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Islam dalam menangani pengangguran dan inflasi menekankan keseimbangan antara kepentingan individu serta masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan transparansi serta efisiensi sistem. Keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat tergantung pada kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta komitmen pada prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitas ekonomi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini telah mengeksplorasi hubungan antara pengangguran dan inflasi serta peran pemerintah dalam menanggulunginya dari sudut pandang ekonomi Islam. Dari analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik. Pertama, menurut pandangan ekonomi konvensional, hubungan antara pengangguran dan inflasi yang dijelaskan dalam

---

<sup>10</sup> Agus Rojak Samsudin, dkk., “Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia; Telaah dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif Syariah” dalam <https://iqtishod.staimasi.ac.id> diakses 12 Mei 2025

Kurva Phillips memang terlihat ada dalam jangka pendek; namun, seiring berjalannya waktu, korelasi ini melemah atau bahkan hilang karena adanya tingkat pengangguran natural serta pengaruh ekspektasi terhadap inflasi. Hal ini dapat dilihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia mengalami penurunan bersamaan antara tahun 2023 hingga 2025. Kedua, dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, keterkaitan antara pengangguran dan inflasi tidak dianggap sebagai trade off yang tidak bisa dihindari, melainkan sebagai dua isu yang dapat diperbaiki bersamaan melalui penerapan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Islam memberi penekanan pada pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam distribusi, yang bisa menurunkan angka pengangguran tanpa menyebabkan inflasi yang tinggi.

Ketiga, tindakan pemerintah dalam menangani pengangguran dan inflasi menurut ekonomi Islam perlu mempertimbangkan aspek moral, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini mencakup penguatan sektor ekonomi riil, pengembangan sistem keuangan yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta pengoptimalan alat untuk redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan wakaf. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Keempat, meski data menunjukkan adanya penurunan pada pengangguran dan inflasi, angka inflasi yang sangat rendah (0,76% pada tahun 2025) perlu diperhatikan, karena hal ini bisa menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat serta permintaan agregat. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Aulina, Evi Silvia, dkk. 2025. “Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam: Membangun Ekonomi yang Adil dan Stabil”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3 (1): 139–157, (<https://journal.areai.or.id>)
- Alfian, M., & Nurhadi, D. (2024). *Pengaruh inflasi dan jumlah pengangguran terhadap Non Performing Financing (NPF) pada bank syariah di Indonesia*. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 10(2), 290–305.
- Arifin, Z., & Suryani, E. (2023). *Pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kota Medan tahun 2019–2023*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. Jumlah Pengangguran, (<https://www.bps.go.id>)
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Jumlah Pengangguran, (<https://www.bps.go.id>)

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2025. Jumlah Pengangguran, (<https://www.bps.go.id>)
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. Angka Inflasi, (<https://www.bps.go.id>)
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Angka Inflasi, (<https://www.bps.go.id>)
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2025. Angka Inflasi, (<https://www.bps.go.id>)
- Daulay, A. N., Syahbudi, M., & Lubis, F. A. (2019). *Ekonomi Makro Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Doni, Amsah Hendri, dkk. 2023. “Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional”, dalam <https://jiemas.stai-dq.org>, diakses 25 April 2025.
- Fadillah, R., & Hidayat, T. (2022). *Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 7(1), 15–30.
- Hasanah, M., & Imani, S. (2021). *Pandemi Covid-19: Inflasi dan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam*. Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(1), 1–22.
- Hidayati, Amalia Nuril, dkk. 2025. “Analisis Dinamika Inflasi dan Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Teori Kurva Phillips”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3 (5): 75–85, (<https://ejurnal.kampusakademik.co.id>)
- Imamuddin, Y. (2019). *Kebijakan Islam dalam mengatasi masalah variabel ekonomi makro*. Jurnal MAS, 5(2), 34–50.
- Karimah, Ainal. 2024. “Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Arus Inflasi di Kalsel Periode 2021-2023”. *Journal Islamic Education*, (<https://maryamsejahtera.com>)
- Kurniawan, D., & Putri, S. (2023). *Pengaruh tingkat inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 11(1), 45–60.
- Mujiatun, Siti. 2014. “Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, ([jurnal.umsu.ac.id](http://jurnal.umsu.ac.id))
- Mulyani, S., & Santoso, E. (2021). *Kemitraan koperasi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi anggota*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi, 12(3), 220–235.
- Oktavia, Intan Dwi, dkk. 2024. “Hubungan Inflasi dan Pengangguran Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8 (12), (<https://oaj.jurnalhst.com>)
- Putra, R. A., & Lestari, D. (2023). *Hak dan kewajiban anggota dalam koperasi simpan pinjam*. Jurnal Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat, 7(1), 45–57.
- Rahman, A., & Sari, F. N. (2023). *Pengaruh inflasi terhadap perekonomian Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2), 101–115.
- Samsudin, Agus Rojak, dkk. 2024. “Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia: Telaah dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif Syariah. *Jurnal IQTISHOD: Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2), (<https://iqtishod.staimasi.ac.id>)
- Sari, N., & Wibowo, H. (2024). *Hubungan inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam: Studi empiris di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 70–85.

- Sari, Yolanda Kirana, Agung Rizkiyan, dan Apriza. 2024. "Pengangguran dalam Perspektif Islam". *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 1 (3): 90–100, (<https://ejournal.areai.or.id>)
- Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (Edisi Kedua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Susanti, E., Kartika, M., & Albahi, M. (2024). *Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam*. BIFEJ, 4(2), 45–60.
- Syahputra, R., & Fitriani, L. (2020). *Pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 55–70.
- Wahyuni, S., & Setiawan, B. (2020). *Peran kemitraan usaha dalam pengembangan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 101–115.
- Yuliadi, I. (2019). *Kebijakan Islam dalam mengatasi masalah variabel ekonomi makro*. *Jurnal MAS*, 5(2), 34–50.
- Zainuddin, M., & Nurhadi, D. (2022). *Implementasi hak dan kewajiban dalam kemitraan usaha: Studi kasus di Jawa Tengah*. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 9(4), 300–315.